

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Forum for East Asia – Latin America Cooperation (FEALAC) dibentuk pada tahun 2001 atas prakarsa dari PM Singapura Goh Chok Tong yang dilatarbelakangi oleh peningkatan perhatian terhadap kawasan lain yang merupakan guliran dari kecenderungan hubungan internasional pada dekade 1990-an dimana perkembangan ekonomi di berbagai Negara telah menimbulkan saling ketergantungan ekonomi antar Negara, sebagai dampak dari proses liberalisasi perdagangan dunia. Selain itu, sejalan dengan proses liberalisasi perdagangan dunia, hubungan internasional pasca perang dingin yang ditandai oleh kecenderungan-kecenderungan perubahan global juga telah mendorong masyarakat internasional untuk mengadakan pendekatan-pendekatan kepada kawasan lain, tidak lagi tetangga terdekat dalam kawasan mereka saja. Kecenderungan ini ditambah dengan fenomena perkembangan integrasi berbagai *regional grouping* yang menunjukkan kemajuan yang mengesankan, seperti proses pembentukan Uni Eropa dan ASEAN yang bersifat *outward looking* dan *out reaching* yang mendorong peningkatan kerjasama mereka dengan kawasan lain, baik secara kelompok maupun individu.

Pada umumnya mereka, termasuk Indonesia menyatakan menyadari besarnya potensi dari kedua kawasan baik, dalam bidang ekonomi-perdagangan, politik-keamanan dan social-budaya. Mereka juga menyatakan optimisme bahwa FEALAC dapat terus menjembatani dialog dan kerjasama kedua kawasan.

Sementara itu mengenai tujuan pembentukannya, seperti halnya wadah kerjasama intra kawasan lainnya, FEALAC juga bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian, dialog, kerjasama, *sharing* pengalaman dan membangun kemitraan yang bersahabat. Kerjasama FEALAC juga ditujukan pada upaya menangkap potensi dari kerjasama berbagai sector, seperti ekonomi, perdagangan dan investasi, keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, budaya, olah raga, dan hubungan antar masyarakat. Selain itu, tujuan kerjasama FEALAC juga “*to expand common ground*” menyangkut berbagai isu politik dan ekonomi internasional dengan meningkatkan kerjasama antar Negara anggota di berbagai fora internasional guna mengamankan kepentingan bersama.

Modalitas dialog FEALAC yang tertinggi hingga saat ini masih Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (*Foreign Ministers Meeting/FMM*) yang berlangsung dua-tahunan (*bi-annual event*).

Di bawah FMM terdapat Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (*Senior Official Meeting/SOM*) yang bertugas mengkoordinir persiapan FMM dan memonitor pelaksanaannya agar semua keputusan FMM dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Negara-negara anggota. SOM bertemu setiap tahun, termasuk pertemuan persiapan FMM. Di bawah SOM, terdapat modalitas penting yang menjadi pilar penunjang dan mesin yang menggerakkan FEALAC, yaitu Kelompok Kerja (Pokja) atau *Working Group (WG)* yang beranggotakan pejabat tingkat teknis Negara-negara anggota. Sesuai dengan *areas of cooperation* yang dilaksanakan FEALAC, FMM-1 membentuk tiga (3) Pokja, yaitu :

- Pokja Politik, Pendidikan dan Budaya (WG-1)
- Pokja Ekonomi dan Kemasyarakatan (WG-2)
- Pokja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (WG-3)

Menyadari koordinasi merupakan pekerjaan yang krusial terutama karena FEALAC belum mempunyai Sekretariat, maka untuk memperkuat dan mengefisiensikan koordinasi diantara Negara anggota dalam melaksanakan kegiatan, di FEALAC dikenal adanya *Regional Coordinators* yang dipilih secara consensus oleh FMM. *Regional Coordinators* bertugas mendorong dan memonitor pelaksanaan kegiatan semua Pokja serta menyiapkan FMM. Untuk membantu tugas *Regional Coordinators* dan demi menjaga kesinambungan koordinasi, maka *Regional Coordinators* dibantu oleh *Deputy Regional Coordinator* di masing-masing kawasan, yang salah satu diantaranya setelah FMM akan menjadi *Regional Coordinator* dan penyelenggara FMM berikutnya. Mengingat luasnya bidang kegiatan dan banyaknya sektor instansi teknis yang terlibat, maka guna pengkoordinasian kegiatan, di FEALAC juga terdapat modalitas koordinasi yang disebut *Core Group*, beranggotakan para *Regional Coordinators*, *Deputies Regional Coordinators*, dan Ketua Pokja, Selain itu, juga untuk memudahkan koordinasi antar Negara anggota, juga disepakati bahwa Kementerian Luar Negeri di masing-masing Negara anggota yang bertindak sebagai *national focal point*. Untuk mendukung dicapainya tujuan FEALAC yaitu mendekatkan hubungan kedua kawasan, mekanisme koordinasi dalam FEALAC juga dirancang agar selalu melibatkan Negara-negara anggota yang mewakili masing-masing kawasan.

Pemerintah Indonesia mengharapkan keikutsertaan Indonesia dalam forum kerjasama ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemangku kepentingan di Indonesia, baik untuk pembukaan pasar non-tradisional dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dan perbaikan citra Indonesia demi tercapainya kestabilan politik-keamanan di Indonesia. Mengingat kawasan Asia Timur dan Amerika Latin merupakan kawasan yang sangat dinamis.

Pada FMM (*Foreign Minister Meeting*) ke tiga para Negara anggota sepakat untuk memilih Indonesia sebagai Ko-Ketua Kelompok Kerja (POKJA) I (Politik, Pendidikan, Budaya) bersama dengan Kolombia yang meliputi :

- *Academic Exchange*
- *Exchange of expertise of addressing narcotics, drugs and illicit drug trafficking*
- *Parliamentarians, Journalist and young leaders exchange*

Dalam kaitan ini Indonesia telah menyampaikan inisiatif untuk menyelenggarakan *FEALAC-wide Workshop on Counter Terrorism* di JCLEC Semarang pada bulan Desember 2007, *FEALAC Seminar on Eco-Tourism* di Bali tahun 2008 dan berpartisipasi dalam *FEALAC Journalist Visit Program* bulan Oktober 2007.

Hambatan utama untuk memajukan kerjasama kedua kawasan adalah faktor geografis yaitu jarak yang sangat jauh, sehingga potensi yang besar tidak dapat digarap secara maksimal dan tantangan utamanya adalah *concern* dan *gap* diantara kedua kawasan masih terus berlangsung. Sejarah mencatat betapa berakhirnya Perang Dingin membawa konsekuensi pada hubungan Negara-negara pasca Soviet dengan Amerika dan Eropa. Lekatnya hubungan Barat dengan Indonesia juga terjadi setelah tumbangannya pemerintahan Soekarno pada pertengahan dasawarsa 1960-an, meskipun demikian ideologi jarang menjadi satu-satunya *variable* yang menentukan lingkup dan tingkat hubungan antar Negara. Banyak factor lain yang layak diperhitungkan, mulai dari pertimbangan geopolitik dan geostrategic, orientasi (politik dan ekonomi) rejim, ketidaksepadanan kepentingan luar negeri sampai dengan hubungan yang telah terjalin dengan Negara-negara tertentu sebelum perubahan itu terjadi dan mengingat proksimitas geografi serta regionalisasi ekonomi yang terjadi sejak awal 1980-an.

Amerika Latin merupakan kawasan yang secara tradisional ada dibawah pengaruh Amerika Serikat. Hingga berakhirnya dasawarsa pertama setelah Perang Dingin usai hubungan Asia Pasifik dan Amerika Latin relatif terbatas. Regionalisasi ekonomi menyebabkan sebagian besar Negara lebih disibukkan oleh upaya konsolidasi regional, dan upaya ekspansi keluar kawasan. Di luar isu-isu global, seperti isu non proliferasi nuklir, hubungan utara selatan, dan degradasi lingkungan hidup, jarang terjadi pertemuan kepentingan antara Negara-negara Amerika Latin dan Asia Timur.

Sejak awal tahun 2000-an terdapat dua factor penting yang layak diperhitungkan. Pertama adalah merosotnya kepentingan Amerika Serikat terhadap Amerika Latin, Washington lebih tersita dengan agenda lain, termasuk hubungan transatlantic dan Asia Pasifik sehingga hanya

memperhatikan Amerika Latin pada agenda negative seperti perdagangan obat-obatan terlarang, perpindahan penduduk yang menembus batas Amerika, dan perang terhadap terorisme. Bantuan ekonomi dan militer ke Amerika Latin merosor tajam, dengan pengecualian kepada Kolombia. Lebih dari itu, Amerika menjadi lebih proteksionis kepada Amerika Latin. Kedua adalah menguatnya arus '*sosialisme*' di beberapa Negara Amerika Latin yang segera merupakan tantangan utama bagi barat. Presiden Hugo Chavez menjadi "pahlawan" baru bagi Amerika Latin. Bersama dengan tokoh lain seperti Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brazil) dan Nestor Krichner (Argentina), Amerika Latin seakan-akan menjadi kekuatan tandingan. Kehadiran mereka mengawali politik populis yang kemudian membawa konsekuensi serius, khususnya berkaitan dengan tuntutan mereka untuk meninjau ulang persetujuan dengan perusahaan multuinasional Barat. Negara-negara tersebut menolak apa yang oleh Washington disebut sebagai strategi inokulasi terhadap Chavez dan Fidel Castro, tidak mendukung perang terhadap terorisme dan invasi ke Irak, dan menolak calon Amerika untuk Organisasi Negara-negara Amerika.

Walaupun begitu, Indonesia tetap bergabung dengan FEALAC pada tahun 2001 dan mulai berperan aktif sebagai Ko-Ketua Kelompok Kerja I di bidang Politik, Pendidikan, dan Budaya bersama dengan Kolombia.

Sebagai sebagai salah satu pendiri GNB, Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan beberapa Negara di Amerika Latin, seperti Argentina, Brazil, Kuba, Meksiko dan Peru. Namun mengingat Indonesia pada tahun 1998 – 2001 sedang mengalami krisis ekonomi yang multidimensional, maka pada saat bergabung dengan FEALAC pada tahun 2001, Indonesia bersikap hati-hati, terutama jangan sampai tidak dapat memenuhi komitmen karena terkendala oleh kondisi didalam negeri.

Sejak Indonesia bergabung pada tahun 2001 sampai pada tahun 2003 Indonesia belum terfokus pada kepentingan ekonomi dalam hal ini adalah ekspor ke negara-negara Amerika Latin. Tetapi lebih kepada kerjasama dalam penanganan isu-isu terorisme, timbulnya bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan munculnya penyakit menular.

Kecenderungan Negara-negara Amerika Selatan untuk melepaskan ketergantungannya kepada mitra tradisionalnya (Amerika Utara dan Eropa), di satu sisi telah mendorong Negara-negara tersebut mencari peluang, membina dan meningkatkan hubungan dengan kawasan lain, di sisi lain telah membuka peluang bagi Negara lain termasuk Indonesia untuk meningkatkan dan menginsentifkan kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam berbagai bidang.

B. Rumusan Masalah

“Faktor-faktor apa yang mendorong Indonesia bergabung ke dalam *Forum for East Asia - Latin America Cooperation* (FEALAC) meskipun jika dilihat dari sisi geografis Indonesia berada diluar wilayah regional kedua kawasan tersebut”?

C. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah konsep dalam Hubungan Internasional yang bisa untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisis sering memakai konsep ”kepentingan nasional” sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Hampir semua ilmuwan maupun praktisi Hubungan Internasional sepakat bahwa, alasan pembenar utama bagi tindakan suatu negara adalah kepentingan nasional¹.

Pendapat *Hans J. Morgenthau* mengenai konsep kepentingan nasional :

- Kepentingan Nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain, Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama.
- Kepentingan Nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*), kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain dengan kata lain negara-bangsa harus dapat mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik; yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, dsb), memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya (identitas kultural)
- Dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijakan-kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik

Kepentingan Nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan

¹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (A. Knopf, 1978).

atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik paksaan maupun kerjasama. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup.

Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-negara adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi, politiknya (yaitu identitas politiknya) serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dsb (yaitu identitas kulturalnya).

Konsep kepentingan nasional secara normatif dapat diartikan sebagai serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam tindakan hubungan luar negeri. Sedangkan secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah kepemimpinan dengan perjuangan yang gigih².

Mengenai konsep tujuan K.J Holsti menyebutkan sebagai suatu gambaran masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan mengubah atau mendukung negara lain.³ Tujuan nasional ini pula yang mendorong suatu bangsa terutama negara besar yang mencari peranan yang lebih signifikan baik secara global maupun regional.

Badan pelaksana kepentingan nasional Indonesia dijalankan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dimana didalam BAPPENAS terdapat 7 Deputi yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing.

Untuk bidang perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional dilaksanakan oleh Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, secara garis besar tugas dari Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang perdagangan ,investasi dan kerjasama ekonomi internasional serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya⁴.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 256, Direktorat Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi :

² K.J Holsti, M.Tahir Azhary, *Politik Internasional*. Th 1988 hal 145

³ K.j. Holsti, *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, pentrj. M. Thahir Azhari SH., (Jakarta : Erlangga, 1988), hal.390

⁴ Pasal 256, Bappenas

- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi internasional.
- Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi luar negeri.
- Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi Internasional dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi internasional.
- Pemantauan evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi Internasional.
- Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Kepentingan nasional Indonesia pada hakekatnya adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja cabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2005 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.

Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar

dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada bulan Mei 2005 telah memperkenalkan suatu konsep baru yaitu kebijakan luar negeri “**konstruktivis**”, yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu:

- (1) Pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri;
- (2) Konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan
- (3) Identitas internasional yang solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi. Dengan total diplomasi Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Dalam lingkup tugas dan kompetensi utama Deplu sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, Deplu berupaya melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkan agenda utama yang ditetapkan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam masa lima tahun mendatang.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan kedalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai “**Sapta Dharma Caraka**”, yaitu:

- (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia;
- (2) Membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih tekonologi;

- (3) Meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang;
- (4) Memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme;
- (5) Meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia;
- (6) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekonstruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami;
- (7) Melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. *External creditor* dan juga investor asing menarik diri, maka dengan sendirinya sumber-sumber dana jangka pendek yang menjadi pendukung utama bagi perekonomian Indonesia juga ikut berkurang.

Secara bertahap krisis ekonomi di Indonesia telah berkembang menjadi krisis yang bersifat multidimensi yang melibatkan unsur sosial, politik, etnis, terutama masalah disintegrasi bangsa. Merosotnya nilai rupiah hingga ke titik terendah didorong oleh krisis kepercayaan pihak investor, baik domestik maupun asing terhadap kredibilitas pemerintah yang saat itu tampaknya tidak berdaya dalam menanggulangi masalah tersebut.

Stabilitas keamanan yang tidak menentu menimbulkan keraguan investor untuk melanjutkan penanaman modalnya di Indonesia dan tingginya resiko berusaha yang disebabkan oleh melonjaknya inflasi. Sektor perdagangan terutama ekspor dan impor, yang selama ini mendatangkan devisa utama dalam perekonomian Indonesia, mengalami hambatan yang cukup besar. Demikian juga investasi sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari sektor perdagangan. Indonesia kehilangan sumber foreign exchange yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan ekonomi internasionalnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini telah mencapai angka 5,5% ternyata masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indikasi pulihnya perekonomian Indonesia, menuntut perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Namun angka pertumbuhan tersebut belum cukup bagi upaya Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan peningkatan mutu pendidikan. Meskipun konsumsi dan investasi asing langsung cukup memberikan kontribusi bagi pertumbuhan tersebut selama tahun 2005, namun masuknya investasi asing di Indonesia masih relatif rendah.

Oleh sebab itu penataan kembali perekonomian Indonesia dari sisi makro perlu dilakukan secepatnya agar kegiatan ekonomi mikro, seperti sektor industri/manufaktur dapat bertahan dan kembali berjalan dengan baik. Manajemen yang baik sangat diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali mencapai semuanya itu cukup panjang.⁵

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum kerjasama FEALAC dapat digunakan untuk pembukaan pasar non tradisional dalam rangka pemulihan perekonomian nasional maupun peningkatan kerjasama dan solidaritas antara negara berkembang selatan-selatan.

Perkembangan kawasan di Amerika Latin yang memperlihatkan kecenderungan penguatan integrasi kawasan telah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan hubungan baik secara bilateral (negara per negara), maupun dengan kelompok-kelompok regional serta kelompok antar kawasan. FEALAC merupakan salah satu forum yang memungkinkan pembicaraan mengenai penguatan hubungan antara Indonesia dengan kawasan Amerika Latin.

Salah satu kecenderungan penguatan hubungan tersebut juga terlihat dari mulai dibahasnya kerjasama MERCOSUR – ASEAN pada pertemuan tingkat pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri FEALAC (FMM) di Brasilia pada Agustus 2007.

Dalam bidang politik, hubungan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin selama ini telah berlangsung dengan baik. Hubungan ini dilandasi dengan penuh pengertian, prinsip non-intervensi terhadap masalah-masalah dalam negeri, dan dukungan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Indonesia dan negara-negara Amerika Latin juga telah melakukan pengaturan saling dukung terhadap berbagai pencalonan keanggotaan masing-masing negara di berbagai organisasi Internasional. Hubungan politik yang telah terjalin dengan baik ini secara konstruktif dapat

⁵ wahy.multiply.com/journal

ditransformasi melalui instrumen diplomasi ekonomi guna mendapatkan manfaat yang lebih nyata dan menguntungkan kedua belah pihak.⁶

D. Hipotesa

Berdasar data sementara dan kerangka pemikiran yang digunakan dapat diperoleh jawaban sementara :

Faktor-faktor yang membuat Indonesia bergabung dengan FEALAC pada tahun 2001 adalah :

- Negara-negara anggota FEALAC khususnya negara-negara Amerika Latin merupakan pasar yang sangat potensial bagi Indonesia dilihat dari jumlah penduduk serta rata-rata pendapatan per kapita dan pola hidup masyarakatnya.
- Pertumbuhan perdagangan kawasan Amerika Latin dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya dalam bidang perdagangan non tradisional.
- Indonesia memiliki sumber daya alam non migas yang potensinya perlu dipromosikan di dunia internasional bagi penanaman modal asing dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia dan perbaikan citra Indonesia di dunia Internasional.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berdasarkan pada buku-buku literature, jurnal bulletin, artikel, surat jabar, majalah, dan informasi yang didapat melalui media internet.

Metode Analisis Data Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶ www.fealacindonesia.org/lang-in/indonesia-dan-latin-amerika/deslripsi-umum/politik.html

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membuat terarahnya permasalahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi jangkauan penelitian yaitu pada tahun 2001 dimana FEALAC (Forum for East Asia – Latin America Cooperation) di bentuk melalui prakarsa PM Singapura Goh Chok Tong sampai pada tahun 2008 dimana Indonesia mulai berperan aktif dalam jabatannya sebagai Ko-Ketua Pokja I (Kelompok Kerja) bersama Colombia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I : Berisi pendahuluan, yakni alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tehnik pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Bab ini akan membahas mengenai FEALAC
- BAB III : Berisi pembahasan mengenai kapan bergabungnya Indonesia dan juga peran Indonesia di dalam FEALAC
- BAB IV : Berisi pembahasan tentang faktor-faktor yang mendorong Indonesia bergabung dalam FEALAC dan manfaat yang didapatkan.
- BAB V : Berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sekaligus menegaskan kembali maksud-maksud bahasan tersebut.